

IMPLEMENTASI *FRAUD CONTROL PLAN* (FCP) DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN IAIN PONTIANAK

¹Fauziah, ²Firman

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : fauziah@iainptk.ac.id firmam@iainptk.ac.id

Received : 12-10-2025

Revised : 25-01-2026

Accepted : 25-01-2026

 CC BY 4.0 Attribution 4.0 International
Copyright © 2026 Author(s). This work is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi fraud control plan (FCP) dalam pencegahan kecurangan di lingkungan IAIN Pontianak. Populasi dalam penelitian ini, merupakan para staff dan dosen di lingkungan IAIN Pontianak yang tersebar dari beberapa fakultas, unit dan lembaga. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Voluntary Response Sampling non-probability, dimana siapa saja yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi untuk mengisi survei (Muraiwa, 2015), Kim (2022) merupakan sampel pada penelitian ini, dengan menggunakan data primer dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dengan bantuan google form. Dengan teknik analisis data menggunakan fraud likelihood dan matrik analisis risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imeplementasi Fraud Control Plan (FCP) di lingkungan IAIN Pontianak terutama dalam pengendalian fraud terletak pada aspek dokumentasi, metode identifikasi, serta mekanisme deteksi dini, karena kelemahan di area ini membuat potensi terjadinya kecurangan sulit terdeteksi dengan cepat. Meskipun komitmen pimpinan dan sosialisasi kebijakan relatif terjaga, masih terdapat kerentanan pada kontrol internal dan rotasi pegawai. Secara umum, tingkat risiko dapat dikategorikan cukup tinggi pada aspek teknis pengendalian, namun cukup terkendali pada indikator budaya organisasi yang protektif. Dengan demikian, fokus utama perbaikan perlu diarahkan pada penguatan dokumentasi, deteksi dini, dan metode identifikasi fraud.

Kata Kunci : FCP, IAIN Pontianak

Abstract

This study aims to determine how the Fraud Control Plan (FCP) is implemented in preventing incidents within the IAIN Pontianak environment. The population in this study were staff and lecturers at IAIN Pontianak spread across several faculties, units, and institutions. While the sampling technique used a non-probability Voluntary Response Sampling technique, where anyone who voluntarily chooses to participate to fill out the survey (Muraiwa, 2015), Kim (2022) was the sample in this study, using primary data with a data collection technique using a questionnaire with the help of Google Forms. With data analysis techniques using the possibility of fraud and risk matrix analysis. The results of this study indicate that the implementation of the Fraud Control Plan (FCP) within IAIN Pontianak, especially in controlling fraud, lies in the aspects of documentation, identification methods, and early detection mechanisms, because weaknesses in

these areas make the potential for fraud difficult to detect quickly. Although the commitment of the leadership and the socialization of policies are relatively maintained, there are still vulnerabilities in internal control and employee rotation. In general, the risk level can be categorized as quite high in the technical aspects of control, but quite controlled in the indicators of a protective organizational culture. Therefore, the main focus of improvement needs to be directed at documentation, early detection, and fraud identification methods.

Keywords: FCP, IAIN Pontianak

A. PENDAHULUAN

Fraud adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan pihak lain. Meningkatnya kasus *fraud* terutama di Indonesia telah menjadi masalah serius baik bagi Masyarakat dan bahkan bagi pemerintah (Lubis et al., 2024), (Aristiana & Utomo, 2025). *Fraud* merupakan penipuan yang terdiri kesalahan, menyembunyian informasi penting, penghilangan bukti dan manipulasi yang disengaja sehingga berdampak terhadap kerugian finansial bagi individu atau organisasi (Hilal et al., 2022). Secara umum, menurut Zilbelman *fraud* juga dapat diistilahkan sebagai tehnik atau keahlian seseorang untuk menipu orang lain, agar menyerahkan asset berharga atas dasar ketidakjujuran seseorang (Lubis et al., 2024). *Association fo certified fraud examiners* mengelompokkan *fraud* menjadi tiga bagian, pertama adalah kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan *asset* dan korupsi yang dilakukan (Surjandari & Martaningtyas, 2015). *Fraud* umumnya melibatkan penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penyajian informasi palsu, penggelapan aset, atau penyalahgunaan sumber daya organisasi. *Fraud* berbeda dengan *error* (kesalahan) karena dilakukan dengan niat (*intention*) dan adanya unsur penipuan (*deception*). Sedangkan *fraud* menurut (Fraud, 2022), merupakan penggunaan jabatan seseorang untuk pengayaan pribadi melalui penyalahgunaan organisasi atau sumber daya secara sengaja. (iaasb, 2019) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan tidak sah yang dilakukan dengan maksud untuk menipu, guna memperoleh keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum dan menurut (Tuanakotta, 2018) *fraud* adalah kecurangan yang mencakup perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan keuntungan pribadi atau pihak lain, dan merugikan orang atau pihak tertentu.

Korupsi dan tindak penipuan (*fraud*) telah menjadi tantangan kritis yang menghambat kemajuan dan kepercayaan publik di Indonesia dan praktik korupsi merupakan tindakan *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintah (Kurniasari et al., 2019). Meski pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan membentuk lembaga anti-korupsi, kasus *fraud* masih terus muncul dan berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Peluang korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan dan jaringan politik-ekonomi, lemahnya integritas lembaga public, yang menjadikan Indonesia sulit lepas dari tindakan kecurangan (*fraud*), selain itu juga *opportunity* pemicu terjadinya korupsi di Indonesia (Siregar, 2020). *Fraud* di Indonesia terus menjadi permasalahan serius, dipicu oleh sistem yang memberikan peluang, lemahnya integritas birokrasi, serta terbentuknya budaya korupsi. Dampaknya sangat luas dari

menurunnya investasi asing dan kepercayaan publik, hingga kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Situasi ini memerlukan pendekatan holistik, mulai dari penguatan pengendalian internal hingga reformasi budaya dan teknologi transparansi.

Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh KPK, Indonesia masih cukup tinggi angka korupsinya walaupun mengalami perbaikan persepsi positif, dimana pada tahun 2024 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115. Perbaikan skor ini mencerminkan meningkatnya persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi yang merupakan tindak kecurangan di Indonesia cenderung terus meningkat, sebagai akibat kurang efektifnya penanganan dalam mencegah timbulnya kasus tersebut (Tagora & Putriana, 2022). Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Penelitian sebelumnya banyak menyoroti bahwa untuk mencegah terjadinya *fraud* harus ada pencegahan awal yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun Lembaga pemerintah, baik Langkah menganalisis lingkungan internal, identifikasi risiko (*risk*) dan pemetaan risiko (Fitdin & Azzahra, 2024), selain itu juga pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kerja perlu dilakukan terutama yang berkaitan dengan fraud (Antoni et al., 2024). Dalam merancang dan penerapan untuk mencegah terjadinya fraud dengan pembentukan tim yang bertanggung jawab dalam Menyusun kebijakan anti *fraud* walaupun masih ada atribut FCP belum memadai karena faktor teknis pelaksanaannya (Tagora & Putriana, 2022). Serta investigasi audit dan probabity audit perlu dilakukan oleh Lembaga untuk mencegah atau deteksi Tindakan fraud di lingkungan kerja (Abdullah et al., 2024). Masalah ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan *public* terhadap lembaga pemerintah dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Fenomena korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, yang menunjukkan bahwa tidak ada sektor yang sepenuhnya bebas dari risiko korupsi. Lemahnya sistem pengawasan, rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan, rendahnya integritas individu, rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai, serta lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Selain itu faktor budaya dan norma sosial yang permisif terhadap perilaku korupsi dan faktor ekonomi yang tidak merata juga berperan penting dalam memperkuat praktik korupsi. Hal ini menyebabkan pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sebagai langkah preventif untuk menekan angka korupsi. (Juwita & Yoserizal, 2025). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan *instrument Fraud Control Plan* (FCP) untuk pengendalian sebagai bentuk Tindakan preventif tindak korupsi. Kampus bagian dari institusi pemerintah memiliki peran yang cukup penting dan kewajiban dalam mencegah terjadinya Tindakan *fraud*, agar tugas yang dilaksanakan bisa efektif dan efisien. Salah satu indikator dari permasalahan di lembaga pemerintah ialah dalam pengelolaan keuangan yang bisa dilihat dari hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (Kurniasari et al., 2019). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di Kalimantan Barat. Sebagai perguruan tinggi Islam Negeri pertama di Kalimantan Barat, IAIN Pontianak berperan penting dalam mencetak tenaga pendidik, ulama, akademisi, serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keislaman, pendidikan, hukum, dakwah, dan ekonomi Islam. IAIN Pontianak merupakan salah satu institusi pemerintah, dimana memiliki tugas menyelenggarakan program yang sama untuk memperkuat institusi dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sebagai salah satu instansi pemerintah, IAIN Pontianak juga menyelenggarakan program untuk memperkuat Institusi dan komitmen dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sebagai mana tertuang dalam pedoman pencegahan dan pengendalian Fraud di IAIN Pontianak, memiliki tujuan agar mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan kode etik pengawai, kepatuhan terhadap undang-undang, menciptakan budaya anti *fraud* untuk mencegah dan mengatasi potensi kecurangan secara konsisten dan efisien tanpa mengurangi kinerja. Komitmen pencegahan kecurangan (*fraud*), IAIN Pontianak menganggap penting untuk secara berkala memonitor tindakan dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Oleh sebab itu dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi system pengendalian Tindakan kecurangan dengan *Fraud Control Plan* (FCP) di lingkungan IAIN Pontianak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan survei, dimana penelitian yang menggunakan instrumen survei untuk mengumpulkan data deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian survei digunakan untuk meneliti kondisi yang telah terjadi untuk menemukan faktor-faktor baik yang mendahului atau sebab terjadinya peristiwa yang diteliti (Sugiyono, 2011). (Sivanandam & Mallawi, 2022), jenis penelitian dengan pendekatan survei dilakukan guna mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar atau kecil dengan menggunakan sampel yang kecil. Populasi dalam penelitian ini, merupakan staff dan dosen di lingkungan IAIN Pontianak dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *Voluntary Response Sampling non-probability*, dimana siapa saja yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi untuk mengisi survei (Muraiwa, 2022), (Kim, 2022). Penelitian ini menggunakan metode *likelihood*, implementasi risiko dan dampak risiko, sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Risiko Likelihood

Level	Kategori	Persentase Kemungkinan Terjadi (dalam 1 tahun)	Frekuensi Kemungkinan Terjadi (dalam 1 tahun)
1	Hampir tidak pernah/Sangat Jarang	1% $x < 5\%$	0 s.d 1 kali
2	Jarang/Kemungkinan Kecil	5% $< x < 10\%$	2 s.d. 5 kali
3	Kadang-kadang/ Kemungkinan sedang	10% $< x < 40\%$	6 s.d 9 kali
4	Sering/Kemungkinan Besar	40% $< x < 70\%$	10 s.d 12 kali
5	Sangat Sering	$X > 70\%$	$X > 12$ kali

Sumber : Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan IAIN Pontianak (SPI IAIN Pontianak, 2024)

Tabel 2. Kriteria Skor Dampak (berdasarkan % “Tidak”)

Persentase “Tidak”	Skor Dampak	Interpretasi Dampak
0 – 10 %	1	Sangat Rendah – kontrol sangat baik
11 – 25 %	2	Rendah – sebagian kecil kontrol lemah
26 – 40 %	3	Sedang – beberapa celah penting
41 – 60 %	4	Tinggi – kontrol lemah, potensi kerugian besar
> 60 %	5	Sangat Tinggi – kontrol sangat lemah/nyaris tidak ada

Untuk melihat kategori level risiko fraud sebagai berikut:

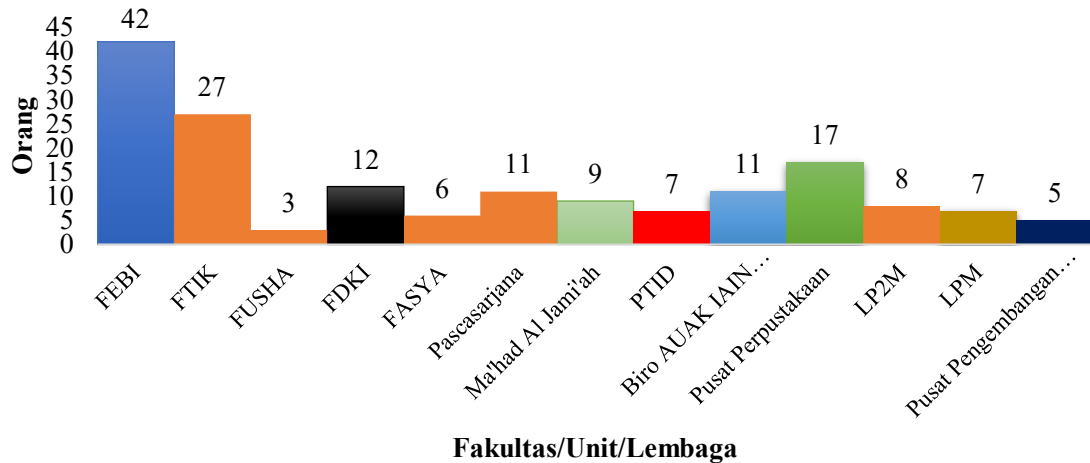
Tabel 3. Level Risiko

Rerata Level Risiko	Kategori	Warna
0 – 4,9	Rendah	Rendah
5.0 – 8,9	Sedang	Sedang
9.0 – 15.9	Tinggi	Tinggi
16,0 - 25	Kritis	Kritis

Sumber : Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan IAIN Pontianak (SPI IAIN Pontianak, 2024)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran survei, didapat bahwa responden yang mengisi survei *Fraud Control Plan* (FCP) tahun 2025 di lingkungan IAIN Pontianak, adalah sebesar 165 responden yang tersebar dari beberapa fakultas, unit dan Lembaga. Jumlah tertinggi yang mengisi survei adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), yakni sebesar 25,45% dari jumlah keseluruhan pegawai yang mengisi survei atau sebanyak 42 orang pegawai, disusul oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), yakni sebesar 16,36% atau sebanyak 27 orang pegawai, sedangkan Fakultas Syariah yakni sebesar 1,82% atau sebanyak 3 orang pegawai yang mengisi survei dibandingkan dengan Fakutlas/Unit/Lembaga yang berada dilingkungan IAIN Pontianak.



Sumber: Olahan data, 2026

Gambar 1. Jumlah Responden FCP Tahun 2025

Hasil penilaian kriteria risiko *Fraud Control Plan* (FCP) dari 18 atribut pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kriteria Risiko *Fraud Likelihood*

INDIKATOR	JAWABAN				LIKELIHOOD	
	JUMLAH		PERSEN		KETERGORI	SKOR
	Iya	Tidak	Iya	Tidak		
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN						
Komitmen anti-fraud dari pimpinan	155	10	93.9	6.06	Jarang /Kemungkinan Kecil	2
Adanya dokumen FCP resmi	118	47	71.5	28.5	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Sosialisasi kebijakan anti-fraud	110	55	66.7	33.3	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Jumlah	128	37.3	77.4	22.6	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN						
Proses penilaian risiko fraud	107	58	64.8	35.2	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Metode identifikasi fraud	93	72	56.4	43.6	Kemungkinan Besar/Sering	4
Keterlibatan unit kerja	109	56	66.1	33.9	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Jumlah	103	62	62.4	37.6	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
MEKANISME PENCEGAHAN						
Pengendalian internal	121	44	73.3	26.7	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Sosialisasi anti-fraud	135	30	81.8	18.2	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Rotasi pegawai/kebijakan cuti	113	52	68.5	31.5	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Jumlah	123	42	74.5	25.5	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
DETEKSI DAN PELAPORAN						
Saluran pelaporan (whistleblowing)	114	51	69.1	30.9	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Sistem deteksi dini	91	74	55.2	44.8	Kemungkinan Besar/Sering	4
Tindak lanjut pelaporan	136	29	82.4	17.6	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Jumlah	114	51.3	68.9	31.1	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
TINDAK LANJUT DAN PENEGAKAN						
Sanksi terhadap pelaku fraud	130	35	78.8	21.2	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Dokumentasi kasus fraud	118	47	71.5	28.5	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Evaluasi dan perbaikan	139	26	84.2	15.8	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Jumlah	129	36	78.2	21.8	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
BUDAYA ORGANISASI ANTI-FRAUD						
Etika dan integritas pegawai	158	7	95.8	4.24	Hampir Tidak Pernah/Sangat Jarang	1
Budaya terbuka	126	39	76.4	23.6	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3
Kepemimpinan memberi teladan	151	14	91.5	8.48	Jarang /Kemungkinan Kecil	2
Jumlah	145	20	87.9	12.1	Kadang-kadang/Kemungkinan Sedang	3

Keterangan: Hasil likelihood didapatkan dari persentase jawaban responden yang mengatakan “**tidak**”. Ex: 6,06 (10/165*100%) dan masuk pada kategori skor ke-2

Sumber: Olahan Data, 2025

Hasil dari hitungan kriteria risiko implementaasi FCP dengan menggunakan metode *likelihood* sebagian besar pada indicator memiliki kategori kadang-kadang atau kemungkinan sedang risiko yang terjadi di lingkungan di IAIN Pontianak, artinya bahwa implementasi *fraud control plan* (FCP) memberikan dampak nyata terhadap pencegahan terjadi tindak kecurangan (*fraud*) di lingkungan IAIN Pontianak, bahwa pada beberapa *item* indicator sangat jarang terjadi tindakan kecurangan terutama berkaitan dengan budaya organisasi anti-fraud, selain itu komitmen pimpinan dalam mencegah terjadinya fraud cukup tinggi dan pemimpin dilingkungan IAIN Pontianak memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap para staff dan dosen, walaupun ada beberapa indicator yang perlu juga diperhatikan karena juga menjadi instrument yang penting bagi pencegahan fraud, seperti indicator metode identifikasi fraud dan system deteksi dini terhadap kejadian fraud di lingkungan IAIN Pontianak.

Untuk mendapatkan hasil dari kriteria skor dampak sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Skor Dampak (berdasarkan % “Tidak”)

Persentase “Tidak”	Skor Dampak	Interpretasi Dampak
0 – 10 %	1	Sangat Rendah – kontrol sangat baik
11 – 25 %	2	Rendah – sebagian kecil kontrol lemah
26 – 40 %	3	Sedang – beberapa celah penting
41 – 60 %	4	Tinggi – kontrol lemah, potensi kerugian besar
> 60 %	5	Sangat Tinggi – kontrol sangat lemah/nyaris tidak ada

Sedangkan hasil dari dampak dari fraud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Kriteria Skor Dampak

INDIKATOR	JAWABAN				DAMPAK “%Tidak”	
	JUMLAH		PERSEN		LEVEL	SKOR
	IYA	TIDAK	IYA	TIDAK		
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN						
Komitmen anti-fraud dari pimpinan	155	10	93.9	6.06	Sangat Rendah	1
Adanya dokumen FCP resmi	118	47	71.5	28.5	Sedang	3
Sosialisasi kebijakan anti-fraud	110	55	66.7	33.3	Sedang	3
Jumlah	128	37.3	77.4	22.6	Rendah	2
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN						
Proses penilaian risiko fraud	107	58	64.8	35.2	Sedang	3
Metode identifikasi fraud	93	72	56.4	43.6	Tinggi	4
Keterlibatan unit kerja	109	56	66.1	33.9	Sedang	3
Jumlah	103	62	62.4	37.6	Sedang	3
MEKANISME PENCEGAHAN						
Pengendalian internal	121	44	73.3	26.7	Sedang	3
Sosialisasi anti-fraud	135	30	81.8	18.2	Rendah	2
Rotasi pegawai/kebijakan cuti	113	52	68.5	31.5	Sedang	3
Jumlah	123	42	74.5	25.5	Sedang	3

DETEKSI DAN PELAPORAN						
Saluran pelaporan (whistleblowing)	114	51	69.1	30.9	Sedang	3
Sistem deteksi dini	91	74	55.2	44.8	Tinggi	4
Tindak lanjut pelaporan	136	29	82.4	17.6	Rendah	2
Jumlah	114	51.3	68.9	31.1	Sedang	3
TINDAK LANJUT DAN PENEGAKAN						
Sanksi terhadap pelaku fraud	130	35	78.8	21.2	Rendah	2
Dokumentasi kasus fraud	118	47	71.5	28.5	Sedang	3
Evaluasi dan perbaikan	139	26	84.2	15.8	Rendah	2
Jumlah	129	36	78.2	21.8	Rendah	2
BUDAYA ORGANISASI ANTI-FRAUD						
Etika dan integritas pegawai	158	7	95.8	4.24	Sangat Rendah	1
Budaya terbuka	126	39	76.4	23.6	Sedang	2
Kepemimpinan memberi teladan	151	14	91.5	8.48	Sangat Rendah	1
Jumlah	145	20	87.9	12.1	Sangat Rendah	1

Sumber: Olahan Data, 2025

Pada hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak terjadinya fraud atas implementasi kebijakan fraud control plan (FCP) di IAIN Pontianak berada pada rata-rata sedang artinya bahwa dan dan banyak juga indicator berada pada kategori sangat rendah seperti pada komitmen anti-fraud dari pimpinan, etika pegawai dan integritas pegawai dan kepemimpinan memberi teladan di Lingkungan IAIN Pontianak.

a. Kebijakan dan Komitmen Manajemen

Komitmen anti-fraud dari pimpinan, Dampak sangat rendah (1), artinya ketidakpatuhan pimpinan jarang terjadi dan tidak menimbulkan efek besar. Adanya dokumen FCP resmi & Sosialisasi kebijakan anti-fraud, Dampak sedang (3), menunjukkan kelemahan dokumentasi/sosialisasi bisa berpengaruh moderat pada risiko fraud. Kesimpulan: Area ini relatif kuat, tetapi risiko dampak meningkat jika dokumen FCP tidak ada atau sosialisasi kurang efektif.

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian risiko fraud, Dampak sedang (3). Metode identifikasi fraud, Dampak tinggi (4), paling rawan karena jika metode lemah, risiko fraud yang tidak terdeteksi bisa menimbulkan kerugian besar. Keterlibatan unit kerja, Dampak sedang (3). Kesimpulan: Faktor paling kritis ada pada *metode identifikasi fraud* (skor 4). Jika tidak diperkuat, risiko fraud bisa berdampak luas.

c. Mekanisme Pencegahan

Pengendalian internal & Rotasi pegawai, Dampak sedang (3). Sosialisasi anti-fraud, Dampak rendah (2). Kesimpulan: Pencegahan sudah cukup baik, tetapi lemahnya internal control atau rotasi pegawai bisa menyebabkan fraud dengan dampak moderat.

d. Deteksi dan Pelaporan

Whistleblowing channel, Dampak sedang (3). Sistem deteksi dini, Dampak tinggi (4), paling rawan. Tindak lanjut pelaporan, Dampak rendah (2). Kesimpulan: Sistem deteksi dini perlu diperkuat, karena jika gagal berfungsi dapat menimbulkan kerugian signifikan.

e. Tindak Lanjut dan Penegakan

Sanksi pelaku fraud & Evaluasi/perbaikan, Dampak rendah (2). Dokumentasi kasus fraud, Dampak sedang (3). Kesimpulan: Dampak fraud relatif terkendali karena ada mekanisme sanksi, tetapi kelemahan dokumentasi masih berpotensi memperburuk risiko.

f. Budaya Organisasi Anti-Fraud

Etika & integritas pegawai, Dampak sangat rendah (1). Budaya terbuka, Dampak sedang (2). Kepemimpinan teladan, Dampak sangat rendah (1). Kesimpulan: Budaya organisasi cukup kuat, sehingga risiko dampaknya sangat rendah.

Untuk melihat kategori level risiko fraud sebagai berikut:

Tabel 7 Level Risiko

Rerata Level Risiko	Kategori	Warna
0 – 4,9	Rendah	Rendah
5.0 – 8,9	Sedang	Sedang
9.0 – 15.9	Tinggi	Tinggi
16,0 - 25	Kritis	Kritis

Sumber : (Fauziah, 2023)

Adapun hasil dari survei yang dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak (Fakultas, Unit dan Lembaga) adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Level Risiko

INDIKATOR	LIKELIHOOD (%)	SKOR	SKOR DAMPAK	LEVEL RISIKO LEVEL RISIKO	KATEGORI
KEBIJAKAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN					
Komitmen anti-fraud dari pimpinan	6.06	2	1	2	Rendah
Adanya dokumen FCP resmi	28.48	3	3	9	Tinggi
Sosialisasi kebijakan anti-fraud	33.33	3	3	9	Tinggi
Jumlah	22.62	3	3	9	Tinggi
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN					
Proses penilaian risiko fraud	35.15	3	3	9	Tinggi
Metode identifikasi fraud	43.63	4	4	16	Kritis
Keterlibatan unit kerja	33.93	3	3	9	Tinggi
Jumlah	37.57	3	3	9	Tinggi
MEKANISME PENCEGAHAN					
Pengendalian internal	26.66	3	3	9	Tinggi
Informasi/sosialisasi anti-fraud	18.18	3	2	6	Sedang
Rotasi pegawai/kebijakan cuti	31.51	3	3	9	Tinggi
Jumlah	25.45	3	3	9	Tinggi
DETEKSI DAN PELAPORAN					
Saluran pelaporan (whistleblowing)	30.90	3	3	9	Tinggi
Sistem deteksi dini	44.84	4	4	16	Kritis
Tindak lanjut pelaporan	17.57	3	2	6	Sedang
Jumlah	31.11	3	3	9	Tinggi
TINDAK LANJUT DAN PENEGAKAN					
Sanksi terhadap pelaku fraud	21.21	3	2	6	Sedang
Dokumentasi kasus fraud	28.48	3	3	9	Tinggi
Evaluasi dan perbaikan	15.75	3	2	6	Sedang

Jumlah	21.81	3	2	6	Sedang
BUDAYA ORGANISASI ANTI-FRAUD					
Etika dan integritas pegawai	4.24	1	1	1	Rendah
Budaya terbuka	23.63	3	2	6	Sedang
Kepemimpinan memberi teladan	8.48	2	1	2	Rendah
Jumlah	12.12	3	1	4	Rendah

Sumber: Olahan Data, 2025

1. Kebijakan dan Komitmen Manajemen

Komitmen anti-fraud dari pimpinan, Rendah (2). Dokumen FCP resmi, Tinggi (9). Sosialisasi kebijakan anti-fraud, Tinggi (9). Artinya bahwa risiko signifikan ada pada dokumentasi dan sosialisasi kebijakan, bukan pada komitmen pimpinan.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian risiko fraud, Tinggi (9). Metode identifikasi fraud, Kritis (16). Keterlibatan unit kerja, Tinggi (9). Metode identifikasi fraud menjadi titik paling kritis, karena kelemahan di sini membuat fraud sulit terdeteksi.

3. Mekanisme Pencegahan

Pengendalian internal, Tinggi (9). Sosialisasi anti-fraud, Sedang (6). Rotasi pegawai/cuti, Tinggi (9). Pada umumnya risiko tinggi, terutama terkait kontrol dan rotasi pegawai. Sosialisasi relatif lebih terkendali.

4. Deteksi dan Pelaporan

Whistleblowing, Tinggi (9). Sistem deteksi dini, Kritis (16). Tindak lanjut pelaporan, Sedang (6). Sistem deteksi dini menjadi faktor paling rawan, karena tanpa mekanisme ini, fraud sulit diungkap cepat.

5. Tindak Lanjut dan Penegakan

Sanksi pelaku fraud, Sedang (6). Dokumentasi kasus fraud, Tinggi (9), Evaluasi & perbaikan, Sedang (6). Artinya bahwa risiko cukup terkendali, namun dokumentasi kasus *fraud* masih rawan terjadi

6. Budaya Organisasi Anti-Fraud

Etika & integritas pegawai, Rendah (1), Budaya terbuka, Sedang (6), Kepemimpinan teladan, Rendah (2), artinya bahwa budaya organisasi menjadi faktor protektif, risiko relatif rendah.

Sedangkan hasil dari matrik analisis risiko pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 9. Matrik Analisis Risiko

MANTRIKS ANALISIS 5 X 5		Level Dampak				
		Sedang (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Level	Hampir Pasti (5)					
	Kemungkinan Besar (4)				2.2, 4.2	

Kemungkinan /Kadang-kadang (3)	Sedang		3.2, 4.3, 6.2	1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 5.2		
Kemungkinan Kecil / Jarang (2)		1.1, 6.3				
Sangat Jarang (1)		6.1				

Sedangkan untuk penanganan risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Level Penanganan Risiko

Level Risiko	Kategori	Response
0 – 4,9	Rendah	Diterima. Risiko dapat ditoleransi, sebagaimana Tindakan pencegahan telah dilakukan dan ditinjau setiap tahunan
5.0 – 8,9	Sedang	Dapat diterima. Risiko dapat ditoleransi jika Tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 6 bulanan
9.0 – 15.9	Tinggi	Risiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh Wakil Rektor manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulanan
16,0 - 25	Kritis	Risiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan prioritas diterapkan. Wakil Rektor harus memantau dan memastikan tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulanan untuk mengurangi tingkat risiko

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak, diperoleh penilaian evaluasi tentang *Fraud Control Plan* (FCP) yang terdiri dari enam indikator utama, baik kebijakan dan komitmen manajemen, identifikasi dan penilaian risiko kecurangan, mekanisme pencegahan, deteksi dan pelaporan, tindak lanjut dan penegakan dan yang terakhir adalah budaya organisasi anti-*fraud*. Risiko utama dalam pengendalian fraud terletak pada aspek dokumentasi, metode identifikasi, serta mekanisme deteksi dini, karena kelemahan di area ini membuat potensi kecurangan sulit terdeteksi dengan cepat. Meskipun komitmen pimpinan dan sosialisasi kebijakan relatif terjaga, masih terdapat kerentanan pada kontrol internal dan rotasi pegawai. Secara umum, tingkat risiko dapat dikategorikan cukup tinggi pada aspek teknis pengendalian, namun cukup terkendali berkat

adanya budaya organisasi yang protektif. Dengan demikian, fokus utama perbaikan perlu diarahkan pada penguatan dokumentasi, deteksi dini, dan metode identifikasi *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., Nurmelani, Andi Yustika Manrimawagau Bayan, & Hadriana Hanafie. (2024). Strengthening Fraud Control Plan For Investigative Audit And Probity Audit In Fraud Detection. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 479–497. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2181>
- Antoni, J., Candira, D., Hamengkubuwono, & Istan, M. (2024). Implementasi Fraud Control Plan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 126–135. <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.25291>
- Apristiana, A. A., & Utomo, C. D. (2025). Corporate Governance and Culture: A Systematic Review. *Owner Riste & Jurnal AKuntasi*, 9(2), 703–725. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11338>
- Fauziah. (2023). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Fraud IAIN Pontianak* (pp. 167–186).
- Fitdin, N. R., & Azzahra, A. F. (2024). Analisis Risiko Strategis Dengan Metode ISO 31 . 000 : 2018 Studi Pada Yayasan TPQ Nurus Shofa Wonoayu Sidoarjo. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, November, 8663–8669.
- Fraud, O. (2022). *Occupational Fraud 2022* :
- Hilal, W., Gadsden, S. A., & Yawney, J. (2022). Financial Fraud: A Review of Anomaly Detection Techniques and Recent Advances. *Expert Systems with Applications*, 193, 116429. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116429>
- iaasb. (2019). *International Auditing and Assurance Standards Board*. <https://www.iaasb.org/>
- Juwita, D., & Yoserizal, Y. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(01 SE-Articles), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01.471>
- Kim, K.-S. (2022). Methodology of Non-probability Sampling in Survey Research. *American Journal of Biomedical Science & Research*, 15, 616–618. <https://doi.org/10.34297/AJBSR.2022.15.002166>
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
- Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., Ovami, D. C., & Brutu, I. R. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 40–50. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Muraiwa, S. (2022). Voluntary sampling design. *International Journal of Advanced Research in*

- Management and Social Sciences*, 4(2), 185–200.
- Siregar, A. (2020). FRAUD TRIANGLE DAN KORUPSI DI INDONESIA. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 67–81.
- Sivanandam, S., & Mallawi, F. O. (2022). Effects of Variable Properties on the Convective Flow of Water near Its Density Extremum in an Inclined Enclosure with Entropy Generation. *Mathematics Article*, 10(3497).
- SPI IAIN Pontianak. (2024). *PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN IAIN PONTIANAK*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta.
- Surjandari, D. A., & Martaningtyas, I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 71–76. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71>
- Tagora, A., & Putriana, V. (2022). Mekanisme dan Implementasi Fraud Control Plan: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7, 133–144. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.424>
- Tuanakotta, T. (2018). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Graha Ilmu.